



Menghadirkan (kembali) Negara

Hubungan Negara dan rakyatnya di era modern, kini makin dilematis. Mengapa? Karena rakyat atau masyarakat di suatu Negara pada era modern seperti saat ini semakin terdidik dan makin tinggi tingkat kesadarannya tentang hak-haknya, bahkan sebelum sempat menyebut kewajiban-kewajibannya (Sudiarja, 2009:vii). Hal ini berlaku juga bagi Indonesia saat ini. Hal ini sangat berbeda dengan dari gambaran Thomas Hobbes (Budiman, 2001:35), yang melukiskan Negara sebagai Leviathan atau bahkan semacam dewa atau pun Tuhan (*Deus mortalis*) yang menakutkan karena kekuasaannya yang besar. Namun, kesadaran demokrasi dewasa ini justru memungkinkan rakyat membatasi sang Leviathan sehingga tidak sewenang-wenang lagi menentukan hukum-hukumnya sendiri.

Kini seiring perkembangan globalisasi, demokrasi telah berkembang dalam ruang-ruang pemerintahan. Pemerintahan terlihat mulai melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan penting, seperti tampak dalam perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Bahkan, kesadaran demokratis tampak pula dalam keterbukaan pemerintah khususnya dalam menerima kritik yang dilontarkan oleh warganya. Pengekangan kebebasan bersuara dan berpendapat, dengan pembungkaman pers yang semena-mena, pemaksaan politik melalui indoktrinasi dan yang

lebih brutal melalui penculikan para aktifis adalah bukan eranya lagi. Militerisme yang merupakan kebijakan pemerintah lama yang masih mencerminkan kekuasaan Negara otoriter model Thomas Hobbes, untuk memaksakan kehendak melalui kekerasan Negara yang kini berangsur reda.

Namun pertanyaan sederhana kemudian muncul : apakah perkembangan demokrasi yang membuka hak-hak rakyat itu tidak akan menggerogoti kewibawaan pemerintahan dalam mengatur Negara? Jawaban atas pertanyaan itu adalah jelas: Tidak! Selama tujuannya adalah untuk menghadirkan Negara di tengah-tengah merosotnya kemampuan Negara atau pemerintah mengelola kesejahteraan rakyatnya.

Terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia memberi angin segar perubahan kearah Indonesia yang lebih baik, dengan menghadirkan Negara untuk berperan mensejahterakan rakyatnya. Presiden yang tidak takut kehilangan wibawanya karena memilih caranya yang terkesan sederhana, apa adanya, dan selalu menebar senyum khasnya itu, akhirnya cukup disenangi oleh warganya karena dinilai merepresentasikan wong cilik. Gaya blusukan yang telah dimulai sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur



DKI Jakarta menambah kesan sebagai Presiden harapan rakyat. Mungkin karena inilah, majalah TIME memilih Jokowi sebagai sampul untuk edisi 27 Oktober 2014 dengan judul *A new hope, Indonesian President Joko Widodo is a force for democracy*.

Langkah Jokowi memang fenomenal. Salah satu hal penting dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi rakyatnya adalah dengan blusukan. Terobosan pendekatan baru dalam menyingkap persoalan public secara langsung inilah yang akhirnya Jokowi dianggap lebih merakyat dan lebih mementingkan rakyat kecil ketimbang para pemodal atau pengusaha, sebagaimana yang umum dilakukan oleh para pemimpin pemerintahan lainnya. Tak pelak, langkah Jokowi ini pun diikuti secara masif oleh para pemimpin di daerah, bahkan banyak kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meniru gaya Jokowi. Wajar jika gaya Jokowi ini menjadi gerakan nasional yang ditiru bukan hanya oleh kalangan pemerintahan saja, namun juga kalangan legislative, dan kalangan masyarakat lainnya.

Jokowi sadar bahwa gaya 'blusukan' ini membutuhkan anggaran besar dan tidak mungkin lagi dilakukan oleh Jokowi sebagai seorang presiden karena luasnya wilayah Indonesia. Apalagi masyarakat Indonesia juga tersebar luas di seluruh dunia. Mereka juga memiliki kekhasan masalah yang dihadapi dan menuntut kepekaan kita untuk mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Untuk itulah langkah terobosan baru Jokowi untuk tetap berjumpa dengan rakyat dilakukan dengan melalui e-blusukan. E-blusukan sebenarnya sama dengan

teleconference sebagaimana yang akhir-akhir ini dilakukan Jokowi dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di delapan negara yakni Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, Mesir, dan Arab Saudi (30/11/2014).

E-blusukan memungkinkan Pemerintah bisa mendengarkan secara langsung keluhan dari TKI, seperti percakapan Yati seorang TKI dari Singapura pada telekonferensi Minggu (30/11/2014) lalu; terkait Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

"Poin penting pertama tentang KTKLN, kami berharap pemerintah menindak oknum bandara. Kami tidak mau ada diskriminasi di bandara sehingga ada TKI gagal terbang, pungli di bandara, apabila pemerintah tidak bisa menindak, kami harap hapuskan KTKLN."

Menanggapi keluhan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan untuk KTKLN, dia meminta pihak BNP2TKI melakukan pengecekan. "Nanti biar dicek langsung oleh BNP2TKI, kalau memang KTKLN bisa diteruskan ya diteruskan kalau nggak bisa ya nggak usah diteruskan," ucap Jokowi. Banyak manfaat yang diperoleh dengan terobosan baru Jokowi ini. Pemerintah dan masyarakat sama-sama diuntungkan. Dan ini menjadi modalitas yang sangat berharga untuk menumbuhkan *trust*, saling percaya antara pemerintah dan masyarakat atau sebaliknya antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam hal melakukan penghematan, Jokowi juga punya cara tersendiri. Misalnya dalam rangka blusukan ke daerah Jokowi lebih memilih menumpang pesawat kelas ekonomi. Dengan naik pesawat



komersil, presiden bisa hemat 100 juta rupiah per titik lokasi yang dia kunjungi. Penghematan itu juga dilakukannya saat blusukan ke Semarang pada Selasa 2 Desember 2014 lalu.

Di masa awal pemerintahannya, Jokowi memberikan keteladanan penting. Bagaimana misalnya Jokowi menghadapi hasil sebuah Survei dimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dirinya mulai menurun pasca kenaikan harga BBM beberapa waktu yang lalu. "Saya tidak peduli itu, dan yang penting kerja, kerja dan kerja".

Sebagaimana diketahui sebuah survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 18-19 November 2014 yang melibatkan responden sebanyak 1.200 orang yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia justru menunjukkan hasil yang berbeda dengan harapan masyarakat terhadap Jokowi (Movanita, 2014). Hasil survei LSI tersebut mengatakan bahwa sebanyak 39,60 persen responden di kalangan menengah ke bawah mengaku puas pada kinerja Jokowi. Sedangkan 48,52 persen lainnya mengaku tidak puas akan kinerja Jokowi dan sebesar 11,88 persen responden tidak menjawab. Untuk kalangan menengah, sebanyak 60 persen responden menyatakan puas atas kinerja Jokowi sejak dilantik sebagai presiden. Sedangkan sebesar 40 persen responden mengaku tidak puas. Sedangkan pada kalangan menengah ke atas, sebesar 48,44 persen responden mengaku puas atas kinerja Jokowi dan sebesar 37,5 persen merasa tidak puas. Sementara responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 14,06

persen. Ada pesan penting melalui survei ini bahwa hanya sedikit "wong cilik" yang mengaku puas atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Padahal, banyak dari pendukung Jokowi saat Pemilu Presiden yang merupakan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Dari survei yang menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,9 persen dan juga dilengkapi dengan metode analisis media dan wawancara mendalam Jokowi harus menghadapi realitas mulai ditinggalkan pendukung mayoritasnya, terlebih lagi pasca kenaikan harga BBM.

Tantangan Jokowi untuk membangun negeri ini tidak mudah. Namun, Jokowi tetaplah Jokowi. Keberanian mengambil resiko untuk tidak populer telah dia lakukan. Dia akan terus berjalan karena tujuannya adalah menghadirkan Negara di tengah-tengah rakyatnya.

Sebagai upaya untuk menghadirkan Negara, pilihan Jokowi adalah mendorong pembantunya, para menteri melakukan berbagai terobosan dan inovasi pelayanan yang langsung bisa dinikmati rakyatnya. Beberapa orang menteri telah menunjukkan gebrakan awal melalui berbagai terobosan antara lain misalnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Menteri Agraria dan Tata Ruang dan lain sebagainya.

Bagaimana langkah Menteri Susi panggilan akrab dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti



terkait dengan pencurian ikan (*illegal fishing*) dan aktifitas bongkar muat kapal di laut lepas (*trans-shipment*) yang berpotensi merugikan Negara triliunan rupiah. Gebrakan pertama dia lakukan dengan mendatangi pulau Maratua (Kabupaten Berau) dan mengajak Bupati untuk melakukan penangkapan kapal pencuri ikan dan hasilnya puluhan kapal pencuri ikan berbedera asing berhasil ditangkap. Untuk memastikan langkahnya, Menteri Susi meminta dukungan ke presiden dan hasilnya: Presiden memerintahkan penenggelaman kapal pencuri ikan tersebut dengan terlebih dahulu menyelamatkan anak buah kapal atau yang dikenal dengan manusia perahu.

Masalah koordinasi dengan kementerian luar negeri dan pihak angkatan laut dilakukan dengan melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Kepala Staf Angkatan Laut dan Menteri Susi untuk proses penenggelaman Kapal. Dan pada Kamis (4/12/2014) kapal-kapal yang telah ditangkap satu persatu mulai ditenggelamkan.

Susi beralasan bahwa *illegal fishing* harus diperangi. Selain merugikan Negara karena kehilangan potensi penerimaan triliunan rupiah juga karena beberapa alasan berikut : (1) *illegal fishing* sarat dengan kejahatan kemanusiaan karena melibatkan anak-anak di bawah umur; (2) Indonesia harus menelan pil pahit akibat *illegal fishing* yang selama ini mengeruk biota laut ibu pertiwi; (3) menyuburkan klaim Negara lain tentang kekayaan laut Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kesal melihat Malaysia

mengklaim ikan milik Indonesia. Dia mengungkapkan pengalamannya ketika di Eropa, melihat ikan jenis *black tiger* yang diklaim milik Malaysia. Padahal spesies ikan ini hanya hidup di perairan Indonesia. "Ada ikan jenis black tiger yang saya beli di supermarket Eropa, ternyata disebut itu dari Malaysia. Di sana terpampang *fifty seven zone* (zona 57). Memangnya Malaysia punya zona pulau?" ucap Susi dalam rapat di Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Lain lagi dengan gebrakan yang dilakukan oleh Menteri PAN dan RB. Usulan moratorium rekrutmen PNS oleh Menteri PAN dan RB, Yuddy Chrisnandi sontak menimbulkan pro-kontra. Sekalipun moratorium rekrutmen PNS ini baru dalam pembahasan, namun gagasan moratorium PNS hingga waktu lima tahun ini penting ditindaklanjuti. Pasalnya, PNS yang ada masih belum optimal akibat kompetensi yang rendah dan masih banyak daerah memiliki kelebihan pegawai. Sementara itu, alokasi belanja pegawai dalam APBN telah mencapai lebih dari 800 triliun. Angka ini belum sebanding dengan produktifitasnya dalam pelayanan publik. Langkah ini bisa menjadi kesempatan pemerintah untuk mengoptimalkan peran PNS yang ada dengan melakukan peningkatan kualitas profesionalisme dan kompetensi mereka, disamping redistribusi pegawai negeri sipil sebagai profesi Aparatur sipil Negara yang memberikan salah satu tekanan bahwa PNS adalah perekat persatuan dan kesatuan bangsa selain peran pelayanan dan pejabat publik.

Selain itu, dalam rangka penghematan terhadap anggaran



belanja barang dan belanja pegawai, khususnya yang terkait dengan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor, maka mulai 1 Desember 2014 kementerian PAN dan RB Menghentikan rencana kegiatan konsinyering/*Focus Group Discussion* (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti: di hotel/villa/cottage/resort, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan instansi pemerintah masing-masing atau instansi pemerintah di wilayahnya yang memadai.

Tidak hanya itu menteri PAN dan RB juga mengajak untuk membatasi konsumsi produk-produk makan impor. Penggunaan produk makanan tradisional lebih baik. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Surat Edaran No. 10 tahun 2014 tentang peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja aparatur Negara yang mentakan bahwa "untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan kedaulatan pangan, agar menyajikan menu makanan tradisional yang sehat dan/atau buah-buahan produksi dalam negeri pada setiap penyelenggaraan pertemuan/rapat."

Demikian juga dengan ajakan hidup sederhana juga tidak lepas dari terobosan menteri PAN dan RB ini. Melalui Surat Edaran (SE) nomor 13 tahun 2014 tentang gerakan hidup sederhana. SE ini diterbitkan dalam rangka mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Karena itu pemerintah dan pemerintah daerah perlu membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti

pernikahan, tasyakuran dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1000 orang. Selain itu juga tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepatutan sebagai rasa empati kepada masyarakat.

Hal berbeda dilakukan menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan yang mengusulkan instansinya untuk membuka loket pelayanan pada hari sabtu dan minggu per-November 2014. Hal ini berlaku untuk seluruh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diberlakukan karena sebagian besar PNS dan pegawai swasta pada hari itu libur sehingga bisa mengurus sendiri administrasi pertanahannya ke kantor BPN di berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan pengganti hari liburnya bisa mengambil dari hari Senin - Jum'at setiap minggunya.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Jokowi dan para menteri yang membantunya adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mulai terbuka, transparan serta *responsive* terhadap tuntutan masyarakat. Disinilah peran Negara melalui pemerintah hadir menjumpai rakyat yang membutuhkan, menjadi teladan dan mendengar jeritan dan tuntutan kebutuhan pelayanan.

Apa yang dipersepsikan publik terhadap Jokowi tampaknya juga dapat dilihat pada visi, misi dan sembilan agenda prioritas pemerintahan Jokowi (*nawa cita*). Sebagaimana diketahui



visi Jokowi sebagaimana yang diusung dalam kampanye Pilpres 9 April 2014 yang lalu adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan visi ini, Jokowi menginginkan bahwa Indonesia pada tahun 2019 adalah Indonesia yang memiliki kemandirian dan mensejahterakan, mampu menghadirkan Negara yang bekerja dan revolusi mental. Jokowi menyadari bahwa bangsa ini menghadapi tiga persoalan besar berupa : merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Ketiga persoalan ini menuntut upaya penyelesaian yang sistematis dan cepat.

Untuk itulah Pemerintahan Jokowi berkomitmen untuk menuntaskan berbagai persoalan di atas dengan melaksanakan sembilan program prioritas yang kemudian lebih dikenal dengan nawa cita Pemerintahan Jokowi - JK : (1) menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara; (2) membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; (4) menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan

pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" dengan wajib belajar 12 Tahun bebas pungutan; peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu "Indonesia Sehat"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar; program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta Jaminan Sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotism dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia; dan (9) memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga, sehingga bisa mengembalikan ruh kerukunan antarwarga sesuai dengan jiwa konstitusional dan semangat Pancasila 1 Juni 1945.

Kesembilan program prioritas



inilah yang menjadi tolok ukur keberhasilan Jokowi hingga berakhirnya masa pemerintahan kabinet kerja, tahun 2019. Jokowi harus terus meyakinkan bukan hanya konstituennya saja tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia dengan kerja keras dan kerja nyata.

Menghadirkan kembali Negara di tengah-tengah rakyat menjadi solusi bagi merosotnya wibawa Negara. Negara perlu menjamin rasa aman dan melindungi setiap warga negaranya. Negara juga harus memberantas korupsi dan melakukan penegakan hukum. Negara pun juga harus melakukan pelayanan publik tanda diskriminasi, karena setiap warga Negara berhak atas pelayanan publik yang murah, mudah, cepat, profesional dan akuntabel.

Perubahan *mindset* dan *culture-set* telah ditunjukkan oleh Jokowi dan para menteri sebagai pembantunya. Mungkin ada sebagian dari mereka yang mulai gelisah karena mereka mulai kehilangan wibawanya. Mereka tidak lagi disegani, paradigma priyayi telah dirubah menjadi abdi yang akan selalu siap melayani masyarakat. Sehingga wajar jika masyarakat memiliki persepsi tentang menteri-menteri di kabinet Jokowi yang berbeda jika dibandingkan dengan kabinet-kabinet sebelumnya. Seorang menteri bisa ditemui kapan saja, dimana saja, tidak prosedural, dituntut untuk selalu tersenyum dan selalu dekat dengan masyarakat tanpa ada jarak. *Image* inilah yang perlu diteruskan. Sekali lagi, yang dibutuhkan rakyat pada menterinya

bukanlah sosok priyayi yang gila hormat, juga bukan sosok disegani karena status sosialnya yang berbeda dengan rakyat. Namun seorang menteri yang diharapkan oleh rakyat adalah sosok seorang menteri yang berperilaku sebagai seorang guru yang penuh keteladanan, dekat dengan muridnya dan selalu mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dan keummatan. Mereka selalu hadir dalam saat yang tepat disaat masyarakat membutuhkan. Kehadiran mereka adalah simbol kehadiran Negara ditengah-tengah masyarakat.

Maka janji Jokowi, sebagaimana yang tercantum dalam visi dan misinya selama kampanye pemilihan presiden perlu untuk di catat bahwa Jokowi akan selalu membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 12 Tahun 2008. Pemerintahan Jokowi juga akan secara konsisten menjalankan agenda Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui *citizen charter* dalam UU Pelayanan Publik. Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif



masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Semuanya kita menunggu konsistensi langkah Jokowi yang akan selalu menghadirkan Negara di tengah-tengah kita, rakyat dan bangsa Indonesia. Semua rakyat Indonesia berharap pada anda, karena anda adalah harapan baru rakyat. Anda adalah harapan bagi yang tidak mampu meraih apa yang diinginkannya, yang mendorong mereka menginginkan apa yang diinginkannya, sebagaimana ungkapan seorang arsitek, musisi, penulis, pematung dan pelukis Renaissance Italia, Leonardo da Vinci *Chi non puo quell che vuol, quell che puo voglia* (Leonardo da Vinci). Selamat pak Presiden, semoga amanah dan konsisten! *Mariman Darto.*

Bibliografi

- Budiman, Arif dalam Sularto, St. 2001. Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi : Menyambut 70 Tahun Jakup Utama. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. Survei LSI: "Wong Cilik" Tidak Puas dengan Kinerja Jokowi. <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/21/18215031/Survei.LSI.Wong.Cilik.Tidak.Puas.dengan.Kinerja.Jokowi>. Diunduh pada 2 Desember 2014.
- <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/16/118614699/Jokowi-Jadi-Cover-Majalah-Time>. Diunduh pada 2 Desember 2014.
- Prijono, Onny S dan Pranarka, A.M.W. 1996. Pemberdayaan : Konsep,

Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS.

- Sudiarja SJ, A. dalam Forum Mangunwijaya III. 2009. Negara Minus Nurani : Esai-Esai Kritis Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sularto, St. 2001. Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi : Menyambut 70 Tahun Jakup Utama. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

